

**FENOMENA DEMOSTRASI ANARKI DI INDONESIA, SEBUAH TINJAUAN KRITIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM****Firmansyah<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN PalopoE-mail: [firmaryahhukum@iainpalopo.ac.id](mailto:firmaryahhukum@iainpalopo.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to find out the factors that cause anarchic demonstrations so that students in carrying out demonstrations are sometimes anarchic and then what are the efforts to deal with anarchic demonstrations. This study uses a normative approach, data analysis is carried out using descriptive-qualitative analysis. The results of the research are the factors that cause demonstrations, namely culture, awareness and policies that are not pro-people, besides that the efforts that can be taken in handling anarchic demonstrations are that the government must be pro-active or respond to demands or aspirations from the mass of demonstrators and related parties must take action with persuasive actions so that there is no clash between the related parties and the demonstrators.*

**Keywords:** *demonstration, anarchist, law, policy*

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang anarki sehingga mahasiswa dalam melakukan demonstrasi terkadang anarkis dan selanjutnya apa upaya dalam penanganan demonstrasi yang anarki Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu faktor penyebab demonstrasi yaitu seperti budaya, kesadaran dan kebijakan yang tidak pro-rakyat, selain itu upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan demonstrasi yang anarkis adalah pemerintah harus pro aktif atau merespon tuntutan atau aspirasi dari massa pendemo serta pihak terkait harus melakukan penanganan dengan tindakan persuasif sehingga tidak ada benturan antara pihak terkait dengan massa pendemo.

**Kata kunci:** demonstrasi, anarkis, hukum, kebijakan.

**Latar belakang**

Demonstrasi adalah kegiatan menyampaikan pendapat yang secara yuridis dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”<sup>1</sup>

secara lebih jelas pengertian demonstrasi diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pasal 1 angka 3 disebutkan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran

---

<sup>1</sup> UUD 1945 pasal 28

dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.<sup>2</sup>

Beberapa kebijakan pemerintah yang dipersoalkan masyarakat sehingga menjadi pemicu terjadinya demostrasi, sepanjang tahun 2023-2023 tercatat beberapa demonstrasi yang terjadi diantaranya; aksi unjuk rasa bulan april yang menolak penundaan pemilu serentak tahun 2024, aksi menolak kenaikan harga bahan pangan pokok dan BBM dan dilanjutkan bulan september dengan kasus yang sama “kenaikan BBM”<sup>3</sup>selanjutnya demostrasi terkait KUHP dan UU cipta Lapangan Kerja. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan kontroversi tersebut oleh gramsci dianggap sebagai sebuah hegemoni.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut langkah yang biasanya ditempuh oleh masyrakat termasuk didalamnya mahasiswa,dll adalah melakukan demonstrasi baik secara dialogis maupun turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi (parlemen jalanan)

namun terkadang beberapa aksi demonstrasi terkadang berujung pada tindakan-tindakan anrkis, seperti membakar ban dijalan dan bahkan menutup jalan, bahkan yang lebih parah ketika terjadi bentrok antara massa pendemo dengan penegak hukum atau bahkan dengan masyarakat yang terkadang berakhir dengan kerusakan fasilitas umum dan bahkan tewas, menurut data dikutip khusus dijakarta terkait demonstrasi menentang UU Cipta Lapangan kerja tercatat kerugian mencapai Rp. 65 miliar.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang anarki sehingga mahasiswa dalam melakukan demonstrasi terkadang anarkis dan selanjutnya apa upaya dalam penanganan demonstrasi yang anarki.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi dokumen-dokumen hukum dan karya tulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan,

---

<sup>2</sup> UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

<sup>3</sup> <https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744407933/3-aksi-demo-di-tahun-2022-karena-kebijakan-pemerintah-yang-buat-susah-rakyat?page=2>

<sup>4</sup> Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci/Negara dan hegemoni, cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009),hlm 6

---

<sup>5</sup>

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/685665/kerugian-fasilitas-umum-akibat-demo-capai-rp-65-miliar>, diakses 13 juli 2023

yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, koran, majalah, serta sumber-sumber internet. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana hasil analisis diberikan dalam bentuk ringkasan bacaan, termasuk jurnal nasional dan referensi lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang diteliti berdasarkan dokumen-dokumen hukum dan karya tulis yang telah dikaji.

### **Faktor-faktor penyebab demonstrasi anarki**

Sebelum membicarakan tentang faktor yang berpengaruh terhadap demonstrasi perlu dipahami definisi dari anarki, menurut KKBi<sup>6</sup> anarki berarti; 1) hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban. 2) kekacauan (dalam suatu negara). Pandangan lain menurut Naom Chomsky, anarkisme memiliki beragam bentuk dan karakteristik baik dalam pemikiran maupun praksisnya. Chomsky juga menyatakan bahwa meskipun sejarah pemikiran libertarian

dieksplorasi secara teliti dan tradisi-tradisinya dikembangkan, tetap sulit untuk merumuskan doktrin-doktrin anarkisme sebagai teori yang spesifik dan determinan tentang masyarakat dan perubahan sosial. Chomsky mengacu pada pandangan Rudolf Rocker, seorang sejarawan anarkis. Menurut Chomsky, Rocker menyajikan konsepsi yang sistematis tentang perkembangan pemikiran anarkis melalui *anarcho-sindikalisme*. Rocker berpendapat bahwa anarkisme bukanlah "sistem sosial yang tetap dan kaku", melainkan tren yang pasti dalam perkembangan sejarah manusia yang bertentangan dengan dominasi intelektual oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan keagamaan. Anarkisme menginginkan pembebasan tanpa batas bagi semua kekuatan individual dan sosial dalam kehidupan. Kebebasan sendiri adalah konsep yang relatif, bukan absolut, karena terus berkembang dan mempengaruhi berbagai kelompok dengan beragam cara.<sup>7</sup>

Dalam konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa anarki adalah sebuah tindakan yang berakibat pada kekacauan atau pengrusakan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/anarki>, diakses 13 Juli 2023

---

<sup>7</sup> Suharto Suharto and Mahmuddin Mahmuddin, "Komunikasi Dakwah Dan Fenomena Demonstrasi Anarkis Di Makassar," *Idarotuna* 3, no. 2 (2021): 116.

anarki yaitu mahasiswa/masyarakat menyadari untuk sebuah perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi dari kondisi semula, dan pola perlawanan yang terjadi adalah vertikal dimana terjadi secara kolektif dan diharapkan demonstrasinya dengan cara dialogis bukannya cara paksaan, tetapi saya melihatnya demonstrasi yang dilakukan adalah cara paksaan dengan indikator selalu berujung tawuran.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para demonstran anarki yaitu:

- Penulis kemudian mengaitkan dengan budaya sebagai contoh dalam konsep budaya *siri' na pacce* bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar erat kaitannya dengan konsep *pacce*, dimana ada sebuah empati terhadap kondisi masyarakat dengan dinaikkannya harga bahan bakar minyak ini, timbul kemudian pertanyaan kenapa mereka anarkis, penulis melihatnya yang pertama bahwa demonstrasi ketika dilakukan dengan damai itu akan membuat pemerintah acuh sehingga mereka

melakukan anarkisme supaya pemerintah dapat memperhatikan tuntutan para demonstran, yang kedua bahwa karena kuatnya budaya *pacce* yakni mempertahankan pendirian maka apapun dilakukan sampai ada solusi dari pemerintah bahkan terkadang mereka melakukan anarkisme ketika terpancing, disini kemudian timbul *siri'* yakni budaya malu untuk mempertahankan diri.

- Adanya sebuah kesadaran bahwa untuk sebuah gerakan harus tampil para intelektual organik yang kemudian turun untuk melakukan demonstrasi dalam hal ini adalah para mahasiswa, jadi penulis melihatnya bahwa gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di terinspirasi dari teori konflik gramsci,<sup>8</sup> dengan adanya sebuah hegemoni atau paksaan yang dilakukan oleh penguasa dan salah satu cara untuk mengembalikan kepada keadaan semula adalah dengan melakukan perlawanan tetapi dengan meyatukan langkah yang oleh Danrendorf dengan adanya sebuah kelompok kepentingan (*interest group*) dan oleh Gramsci

---

<sup>8</sup> *Op.,cit.*, Nizar., hlm 10

disebut dengan intelektual organik dengan struktur organisasi yang jelas dan harus mampu menyatukan berbagai kelompok dan kelompok itu harus mempunyai ideologi yang jelas sebagai alat pemersatu berbagai golongan dan sebagai alat penggerak dalam pergerakan. Dalam teori hubungan masyarakat, bahwa penyebab terjadinya sangketa adalah oleh polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami sangketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

- Dalam demonstrasi terkadang terjadi tawuran antara mahasiswa dengan polisi, penulis melihatnya ini sesuai dengan teori identitas berasumsi, bahwa terjadinya sangketa disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan, dalam hal ini tanpa melihat

kelompok mana yang lebih dahulu untuk melakukan tawuran maka sesuai teori ini, maka kelompok yang merasa identitasnya terancam maka akan melakukan sebuah perlawanan, misalnya mahasiswa yang melakukan pengrusakan pos polisi, penutupan jalan sehingga berakibat pada kemacetan maka polisi dalam hal ini identitasnya terancam karena tidak mampu menjaga keamanan, tentu akan melakukan antisipasi yang terkadang ditanggapi secara berlebihan oleh mahasiswa sehingga pecahlah tawuran.

- Dalam demonstrasi juga terkadang terjadi mis komunikasi antara aparat kepolisian dengan demonstran sehingga terjadi bentrok hal ini sesuai dengan teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa sangketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda, budaya yang berbeda disini menurut penulis adalah budaya polisi dengan budaya demonstran sehingga timbul chaos.
- Faktor penyebab lain adalah sesuai dengan teori transpormasi sangketa berasumsi sangketa terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan

yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi, serta teori kebutuhan masyarakat yakni adanya pembatasan masyarakat untuk menikmati kebutuhan dasar, demonstran kemudian melakukan demonstrasi karena didorong oleh adanya sebuah ketidakadilan dari pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yang tentunya akan berpengaruh pada masyarakat grass root.

- Dan yang terakhir bahwa sesuai teori C. Wright Mills bahwa para demonstran memandang bahwa negara dalam hal ini keliru dengan mengeluarkan kebijakan misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dll, sehingga demonstran menganggap bahwa polisi adalah bagian dari negara yang ingin menghalangi mereka untuk melakukan demonstrasi.
- Adanya dominasi atau hegemoni dari pemerintah yang mencoba menciptakan sebuah keteraturan melalui agen-agensya serta berusaha menggiring masyarakat untuk secara sukarela setuju dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti terlihat ketika asumsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disepakati oleh masyarakat maka

pemerintah berusaha untuk membuat keteraturan dalam masyarakat seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang dikemas dalam program bantuan langsung tunai (BLT) ataukah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), padahal pembagian dana seperti ini dalam kenyataannya sangat tidak tepat sasaran.

Terakhir bahwa penggerak mahasiswa melakukan demonstrasi adalah keterpurukan hukum dan nilai-nilai budaya permisif, ideotisme, feodalisme, dan berbagai isme-isme lainnya yang dijadikan jargon-jargon politik sehingga negeri ini semakin terpuruk dengan proses ideotisme itu sendiri, dan hukum telah kehilangan model dan rupanya, bukan lagi sebagai panglima (*supremacy of law*) melainkan sebagai monster yang menakutkan yang setiap saat meminta korban jiwa anak bangsa (*soul sacrificed victims*) atau kata lain tumbal dari sesat pikir (*fallacy of the thinking*) yang dipraktekkan oleh penguasa.<sup>9</sup>

---

9 Abraham Amos, Katastropi hukum & quo vadis sistem politik di Indonesia, Cetakan pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 73-74

### Usaha-usaha yang ditempuh penanganan demonstrasi yang anarkis

Untuk usaha penanganan masalah demonstrasi yang anarkis di Makassar, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk menemukan formula yang tepat dalam penanganan demonstrasi yang anarkis, seperti teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin strategi dalam penyelesaian sengketa yaitu:

- *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya, saya melihatnya bahwa mestinya pemerintah lebih memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengadakan pertemuan langsung dengan mahasiswa sehingga timbul komunikasi, tetapi dalam hal terjadi sehingga mereka mencari cara bagaimana supaya pemerintah mendengar aspirasi mereka, terkadang dengan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, dalam hal ini Habermas seorang filosof mazhab Frankfurt menengahkan teori komunikasi dalam penyelesaian sebuah persoalan dan hal tersebut berbeda

dengan Marxis kiri yang tetap memegang teguh “jalan konflik”.<sup>10</sup>

- *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak, hal ini merupakan solusi yang tepat dengan mempertemukan kedua belah pihak, seperti perwakilan dari demonstran dengan perwakilan dari pemerintah untuk mencari solusi dalam mengakhiri persoalan.
- *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun secara psikologis, hal ini juga perlu, tetapi dibutuhkan sebuah jiwa besar baik demonstran ataupun polisi untuk meninggalkan tempat sehingga konflik tidak meluas.

Sedangkan menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa yaitu:

- *Lumping it* (membiarkan saja), yaitu pihak yang merasa perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan, dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan

---

10 F.Budi Hardiman, Kritik Ideologi, cetakan ketiga (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 88-89



dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya, ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungannya, tapi saya melihatnya dalam kasus demonstrasi disatu pihak yakni masyarakat ada semacam pembiaran dalam hal ini disebabkan kurangnya info atau pengetahuan melalui jalur hukum dan diperkirakan akan ada kerugian yang besar, tetapi dipihak lain tidak halnya demikian dengan tampilnya kaum mahasiswa yang oleh gramsci disebut intelektual organik dan oleh Dandrendorf adalah kelompok kepentingan (*Interest group*).

- *Coercion* (paksaan), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksa ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai, hal ini yang sering terjadi

dimana terkadang pemerintah disatu sisi memaksakan kehendaknya supaya masyarakat bisa menerima keputusan dari pemerintah dan disatu pihak juga masyarakat melalui massa pendemo memeksakan kehendak untuk juga memaksakan kehendak supaya tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah sehingga dua kepentingan yang berbeda ini bertemu dan akhirnya terjadi konflik.

- *Negotiation* (perundingan), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan, pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada, hal tersebut sering juga dilakukan oleh polisi dengan massa pendemo tetapi hal tersebut menurut
- *Mediation* (mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan,



pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu dan dalam masyarakat kecil bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim, hal tersebut menurut saya sangat tepat untuk karena jika hanya dua pihak antar pendemo dan polisi tidak akan ada solusi, olehnya dibutuhkan pihak ketiga yang netral untuk sama-sama mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak dan menemukan solusi yang tepat dalam hal ini adalah mediator.

- *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa dan juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu, artinya berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.
- *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang

merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut.

- Selain itu harusnya ada peran universitas untuk lebih memaksimalkan pelajaran agama dan pendidikan karakter.
- Pemerintah harusnya merespon setiap tuntutan dari pendemo dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa, sehingga tidak terjadi konflik.
- Semua pihak harus duduk bersama untuk membicarakan langkah yang tepat dalam penanganan demonstrasi, seperti melakukan upaya persuasi kepada massa pendemo untuk melakukan demonstrasi secara lebih elegan.
- Para aktivis mahasiswa juga harus duduk bersama untuk mengevaluasi pergerakan demonstrasi yang mereka lakukan, yang mana pergerakan mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya begitu ditakuti oleh penguasa serta mendapat simpati dari rakyat yang dimanifestasikan dengan turun kejalan bersama dengan mahasiswa tetapi belakang ini demonstrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa bukan lagi mendapat simpati tapi justru mendapat

antipati dari masyarakat, ini semestinya menjadi pertimbangan mahasiswa karena demonstrasi tidak akan berhasil tanpa didukung oleh power society, karena itu sesungguhnya sebuah kekuatan, dapat kita komparasikan dengan pergerakan mahasiswa dalam menjatuhkan rezim orde baru dan oleh Gramsci kekuatan intelek ini harus mampu mengalahkan hegemoni penguasa dengan melahirkan kesadaran kritis warga masyarakat dan berjuang bersama masyarakat untuk melawan hegemoni penguasa.

- Harusnya konsep budaya sebagai contoh *Siri Na' pacce* betul-betul dipahami dan menjadi landasan bagi pergerakan mahasiswa dengan memahami nilai-nilai filosofis dari *siri na pacce* ini seperti :

1. Nilai Filosofis.

Nilai Filosofis *siri' na pacce* adalah gambaran dari pandangan hidup orang-orang Bugis dan Makassar mengenai berbagai persoalan kehidupan yang meliputi watak orang Bugis Makassar yang reaktif, militan, optimis, konsisten, loyal, pemberani dan konstruktif.

2. Nilai Etis.

Pada nilai-nilai etis *siri' na pacce* terdapat nilai-nilai yang meliputi: teguh pendirian, setia, tahu diri, jujur, bijak, rendah hati, sopan, cinta dan empati.

3. Nilai Estetis

Nilai estetis dari *siri' na pacce* meliputi nilai estetis dalam non insani yang terdiri atas benda alam tak bernyawa, benda alam nabati, dan benda alam hewani.

Berdasarkan hal itu dalam pergerakan mahasiswa khususnya demonstrasi, penulis kira sangat tepat nilai-nilai ini diterapkan, seperti empati dengan keadaan masyarakat sehingga memperjuangkannya dalam bentuk demonstrasi dengan betul-betul memperjuangkan (kokoh pendirian), serta *siri* atau malu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sebagai kesimpulan pemerintah harus pro aktif atau merespon tuntutan atau aspirasi dari massa pendemo serta pihak kepolisian harus melakukan penanganan dengan tindakan persuasif sehingga tidak ada benturan antara polisi dengan massa pendemo.

### Kesimpulan

Ada beberapa faktor penyebab demonstrasi yaitu seperti budaya, kesadaran dan kebijakan yang tidak pro-rakyat, selain itu upaya yang dapat ditempuh dalam pengangan demonstrasi

yang anarkis adalah pemerintah harus pro aktif atau merespon tuntutan atau aspirasi dari massa pendemo serta pihak terkait harus melakukan penanganan dengan tindakan persuasif sehingga tidak ada benturan antara pihak terkait dengan massa pendemo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amos, Abraham, Katastropi hukum & quo vadis sistem politik di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Budi F. Hardiman, Kritik Ideologi, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Rusdi, konflik sosial dalam proses ganti rugi lahan dan bangunan lumpur lapindo, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- Salim, h dan Erlis Septina Nurbaeti, Penerapan Teori hukum pada Tesis

dan disertasi, Jakarta: Raja Grafindo, 2013

Tompo, Rusdin, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P21 Makassar, Makassar

Suharto, Suharto, and Mahmuddin Mahmuddin. "Komunikasi Dakwah Dan Fenomena Demonstrasi Anarkis Di Makassar." *Idarotuna* 3, no. 2 (2021): 116.

UUD 1945 pasal 28

UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

[http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri' Na Pacce/](http://Fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/Siri%27-Na-Pacce/)

"Siri' Na Pacce," Akses 18 november 2013

<https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2744407933/3-aksi-demo-di-tahun-2022-karena-kebijakan-pemerintah-yang-buat-susah-rakyat?page=2>

<https://kbbi.web.id/anarki>, diakses 13 Juli 2023

